

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) DALAM MENINGKATKAN AKSES PENDIDIKAN

Eka Wahyu Hidayat^{1*} Jesika Yesivani Boangmanalu²

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jayabaya

²Mahasiswa Prodi Administrasi Negara, FISIP Universitas Jayabaya

Abstrak

Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan kebijakan pemerintah di sektor pendidikan yang bertujuan memperluas kesempatan belajar bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu. Kebijakan ini diharapkan dapat menekan hambatan ekonomi yang selama ini menyebabkan rendahnya partisipasi pendidikan dan meningkatnya risiko putus sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan Kartu Indonesia Pintar dalam meningkatkan akses pendidikan di Indonesia, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kendala dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur dan analisis dokumen, meliputi dokumen kebijakan pemerintah, laporan resmi kementerian terkait, data statistik, publikasi ilmiah, serta pemberitaan media massa. Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (*content analysis*) dengan menitikberatkan pada indikator efektivitas kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Kartu Indonesia Pintar secara umum cukup efektif dalam meningkatkan akses pendidikan bagi kelompok masyarakat kurang mampu, khususnya dalam membantu pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar dan menekan risiko putus sekolah. Namun demikian, efektivitas kebijakan ini belum sepenuhnya optimal akibat masih adanya permasalahan ketepatan sasaran penerima, pemerataan antarwilayah, serta keterbatasan pengawasan dan sosialisasi kebijakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan Kartu Indonesia Pintar sangat bergantung pada kualitas implementasi dan tata kelola kebijakan.

Kata Kunci: Kebijakan publik, Kartu Indonesia Pintar, pemerataan pendidikan.

Abstract

The Indonesia Smart Card (Kartu Indonesia Pintar/ KIP) is a government policy in the education sector aimed at expanding learning opportunities for students from economically disadvantaged families. This policy is expected to reduce economic barriers that have contributed to low educational participation and an increased risk of school dropout. This study aims to analyze the effectiveness of the Indonesia Smart Card policy in improving access to education in Indonesia and to identify factors that influence its successful implementation as well as the challenges encountered. This research employs a qualitative approach with a descriptive-analytical design. The data used are secondary data collected through literature review and document analysis, including government policy documents, official reports from relevant ministries, statistical data, academic publications, and mass media coverage. Data analysis was conducted using content analysis, focusing on indicators of public policy effectiveness. The findings indicate that the Indonesia Smart Card policy is generally effective in improving access to education for disadvantaged groups, particularly by supporting basic educational needs and reducing the risk of school dropouts. However, the policy's effectiveness has not yet been fully optimized due to issues related to targeting accuracy, regional disparities, and limited supervision and policy dissemination. This study concludes that the success of the Indonesia Smart Card policy largely depends on the quality of policy implementation and governance.

Keywords: *Public policy, Indonesia Smart Card, educational equity*

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional karena berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat daya saing bangsa. Dalam konteks negara kesejah-

teraan, pemenuhan hak atas pendidikan menjadi tanggung jawab negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Namun, hingga saat ini akses terhadap pendidikan yang merata masih menjadi persoalan serius, terutama bagi masyarakat dari kelompok ekonomi kurang mampu.

© 2025 Perspektif Universitas Jayabaya. All Right Reserved

Corresponding author: ekatea.id@gmail.com

Received 18 October 2025, Accepted 25 October 2025, Published 31 October 2025

Ketimpangan akses pendidikan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor geografis dan sosial ekonomi, terutama keterbatasan pendapatan rumah tangga. Biaya pendidikan, baik langsung maupun tidak langsung, kerap menjadi penghambat bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan menghambat upaya pemerintah dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan melalui sektor pendidikan.

Sebagai respons atas permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia meluncurkan Program Kartu Indonesia Pintar (selanjutnya disingkat KIP) sebagai instrumen kebijakan di bidang pendidikan. KIP dirancang untuk membantu peserta didik dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat mengakses layanan pendidikan melalui pemberian bantuan biaya pendidikan. Secara normatif, kebijakan ini bertujuan untuk menekan angka putus sekolah sekaligus meningkatkan partisipasi pendidikan pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah.

Meskipun secara desain kebijakan KIP memiliki tujuan yang jelas dan berpihak pada kelompok rentan, implementasi kebijakan publik tidak selalu berjalan seideal yang direncanakan. Berbagai pemberitaan media dan hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pelaksanaan KIP masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti ketepatan sasaran penerima, validitas data, serta koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam penyaluran bantuan. Tantangan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kebijakan KIP benar-benar efektif dalam meningkatkan akses pendidikan secara merata.

Dari perspektif kebijakan publik, efektivitas kebijakan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran atau jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kemampuan kebijakan tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dunn (2018) menegaskan bahwa evaluasi kebijakan merupakan tahap penting untuk menilai apakah suatu kebijakan mampu memberikan dampak nyata sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap efektivitas kebijakan KIP menjadi relevan untuk menilai kinerja pemerintah dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan KIP dalam meningkatkan akses pendidikan di

Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai capaian kebijakan KIP, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasinya. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah dalam penyempurnaan kebijakan pendidikan ke depan.

Kebijakan Publik dan Evaluasi Kebijakan

Kebijakan publik pada dasarnya merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan publik. Dye (2013) mendefinisikan kebijakan publik sebagai *"whatever governments choose to do or not to do"*, yang menegaskan bahwa kebijakan mencakup tindakan aktif maupun keputusan untuk tidak bertindak. Dalam konteks ini, kebijakan publik tidak hanya dipahami sebagai produk hukum, tetapi juga sebagai proses yang melibatkan perumusan, implementasi, dan evaluasi.

Evaluasi kebijakan merupakan tahap penting dalam siklus kebijakan publik karena berfungsi untuk menilai sejauh mana kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dunn (2018) menyatakan bahwa evaluasi kebijakan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kinerja kebijakan, termasuk efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan responsivitas kebijakan terhadap kebutuhan masyarakat. Efektivitas kebijakan, dalam hal ini, merujuk pada kemampuan suatu kebijakan dalam menghasilkan dampak yang sesuai dengan tujuan awal kebijakan tersebut. Oleh karena itu, analisis efektivitas kebijakan KIP menjadi relevan untuk menilai apakah kebijakan tersebut mampu meningkatkan akses pendidikan bagi kelompok sasaran, khususnya peserta didik dari keluarga kurang mampu.

Akses Pendidikan sebagai Tujuan Kebijakan Publik

Akses pendidikan merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan sosial dan menjadi fokus utama kebijakan publik di bidang pendidikan. UNESCO (2015) menegaskan bahwa akses pendidikan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan layanan pendidikan, tetapi juga dengan kemampuan individu untuk memanfaatkan layanan tersebut tanpa hambatan ekonomi, sosial, maupun geografis. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan yang efektif harus mampu menghilangkan berbagai bentuk hambatan yang

menghalangi partisipasi pendidikan.

Di Indonesia, permasalahan akses pendidikan masih menjadi tantangan, terutama bagi masyarakat miskin dan rentan. Data dan kajian kebijakan menunjukkan bahwa faktor ekonomi masih menjadi penyebab utama rendahnya partisipasi pendidikan dan tingginya risiko putus sekolah (BPS, 2022). Dalam konteks ini, intervensi kebijakan melalui bantuan sosial pendidikan menjadi salah satu strategi pemerintah untuk memperluas akses pendidikan secara lebih merata.

Akses pendidikan yang meningkat tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengurangan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, kebijakan publik di bidang pendidikan perlu dievaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa tujuan pemerataan akses pendidikan benar-benar tercapai.

Program KIP sebagai Kebijakan Pendidikan

KIP merupakan kebijakan pemerintah yang diluncurkan sebagai bagian dari upaya perlindungan sosial di sektor pendidikan. Program ini ditujukan untuk membantu peserta didik dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat mengakses pendidikan melalui bantuan biaya pendidikan. KIP menjadi salah satu instrumen kebijakan yang bersifat redistributif, karena menyalurkan sumber daya negara kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan (Kemendikbud, 2021).

Secara normatif, kebijakan KIP dirancang untuk menekan angka putus sekolah dan meningkatkan angka partisipasi pendidikan. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa implementasi KIP masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketidaktepatan sasaran penerima, lemahnya validitas data, serta keterbatasan pengawasan di tingkat lokal (Arumdani et al., 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh kualitas implementasinya.

Dalam perspektif kebijakan publik, Mazmanian dan Sabatier (1983) menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kejelasan tujuan kebijakan, kapasitas pelaksana, serta dukungan lingkungan sosial dan politik. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan KIP perlu dianalisis dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, agar evaluasi kebijakan tidak

berhenti pada aspek normatif semata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis efektivitas kebijakan KIP secara mendalam, khususnya dalam konteks peningkatan akses pendidikan, bukan untuk mengukur hubungan variabel secara statistik. Melalui pendekatan ini, penelitian berfokus pada pemaknaan kebijakan, proses implementasi, serta dampak kebijakan sebagaimana tercermin dalam berbagai sumber informasi publik.

Jenis penelitian deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis pelaksanaan kebijakan KIP serta menganalisis sejauh mana kebijakan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan kebijakan, tetapi juga mengkaji berbagai permasalahan dan tantangan implementasi yang memengaruhi efektivitas kebijakan KIP dalam meningkatkan akses pendidikan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur dan analisis dokumen. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, antara lain dokumen kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan KIP, peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, laporan resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, data Badan Pusat Statistik (BPS), serta publikasi dari lembaga nasional dan internasional yang membahas kebijakan pendidikan dan bantuan sosial. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan jurnal ilmiah dan pemberitaan media massa sebagai sumber data pendukung untuk menangkap dinamika implementasi kebijakan di lapangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dan menyeleksi sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian. Pemilihan sumber data dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan kredibilitas sumber, relevansi substansi, serta keterkaitan langsung dengan isu efektivitas kebijakan KIP dan akses pendidikan. Data yang digunakan dibatasi pada periode setelah implementasi KIP agar analisis lebih kontekstual dan sesuai dengan tujuan penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan

dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*). Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi informasi penting, pola implementasi, serta isu-isu utama yang berkaitan dengan efektivitas kebijakan KIP. Data yang telah dikumpulkan kemudian dikategorikan berdasarkan indikator efektivitas kebijakan publik, seperti ketercapaian tujuan kebijakan, ketepatan sasaran penerima, serta dampak kebijakan terhadap peningkatan akses pendidikan.

Untuk mengatasi kesenjangan data, studi ini menggunakan triangulasi data, yang melibatkan penggabungan informasi dari beberapa jenis sumber data, seperti dokumen pemerintah, laporan statistik, dan publikasi akademis. Dengan menggunakan triangulasi, diharapkan hasil analisis dapat memberikan gambaran yang lebih objektif dan komprehensif mengenai efektivitas KIP dalam meningkatkan akses pendidikan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Kebijakan KIP dalam Meningkatkan Akses Pendidikan

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai dokumen kebijakan, laporan pemerintah, serta temuan penelitian sebelumnya, kebijakan KIP secara umum menunjukkan kontribusi positif dalam meningkatkan akses pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu. KIP dipersepsikan sebagai instrumen kebijakan yang mampu membantu mengurangi hambatan ekonomi yang selama ini menjadi faktor utama rendahnya partisipasi pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menunjukkan bahwa sejak implementasi KIP, terjadi peningkatan angka partisipasi sekolah pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, terutama di wilayah dengan tingkat kerentanan sosial yang tinggi (Kemendikbudristek, 2022). Bantuan yang diberikan melalui KIP memungkinkan peserta didik untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dasar, seperti pembelian perlengkapan sekolah, biaya transportasi, dan kebutuhan penunjang lainnya, sehingga risiko putus sekolah dapat ditekan.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Dunn (2018) yang menyatakan bahwa suatu kebijakan dapat dikatakan efektif apabila mampu menghasilkan dampak nyata sesuai dengan tujuan yang

telah ditetapkan. Dalam konteks KIP, tujuan utama kebijakan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi kelompok sasaran dapat dikatakan tercapai secara relatif, meskipun masih terdapat keterbatasan dalam pelaksanaannya.

Ketepatan Sasaran sebagai Faktor Penentu Efektivitas Kebijakan

Meskipun secara umum KIP menunjukkan dampak positif, hasil analisis juga mengungkap bahwa efektivitas kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh ketepatan sasaran penerima bantuan. Sejumlah studi menunjukkan bahwa masih terdapat peserta didik dari keluarga mampu yang menerima bantuan KIP, sementara sebagian peserta didik dari keluarga miskin justru belum terjangkau oleh kebijakan tersebut (Arumdani et al., 2021).

Permasalahan ketidaktepatan sasaran ini berkaitan erat dengan validitas dan pemutakhiran data penerima bantuan. Basis data yang digunakan dalam penentuan penerima KIP sering kali belum sepenuhnya mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dinamis. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara kriteria normatif penerima bantuan dan realitas di lapangan. Hal ini memperkuat argumen Mazmanian dan Sabatier (1983) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh kejelasan sasaran serta kapasitas administrasi pelaksana kebijakan.

Ketidaktepatan sasaran tidak hanya berdampak pada efektivitas kebijakan secara keseluruhan, tetapi juga memunculkan persepsi ketidakadilan di kalangan masyarakat. Dalam perspektif kebijakan publik, kondisi tersebut berpotensi melemahkan legitimasi kebijakan dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan pendidikan (Dunn, 2018).

Dampak Kebijakan KIP terhadap Pemerataan Akses Pendidikan

Dari perspektif pemerataan, kebijakan KIP memiliki peran penting dalam memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya berada dalam kondisi rentan secara ekonomi. Bantuan pendidikan melalui KIP memungkinkan peserta didik dari keluarga miskin untuk tetap melanjutkan pendidikan tanpa harus terbebani oleh biaya pendidikan yang relatif tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa KIP berfungsi sebagai kebijakan redistributif yang berorientasi pada keadilan sosial.

Pemerataan akses pendidikan melalui KIP belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah. Beberapa daerah, terutama wilayah terpencil dan tertinggal, masih menghadapi keterbatasan dalam akses informasi, infrastruktur pendidikan, serta kapasitas administratif yang memengaruhi efektivitas penyaluran bantuan (Nirwana, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan bantuan pendidikan tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu didukung oleh kebijakan sektor lain yang saling terintegrasi.

Temuan tersebut sejalan dengan pandangan Yulianto dan Rahmawati (2019) yang menekankan bahwa keadilan sosial dalam kebijakan publik tidak hanya diukur dari jumlah bantuan yang diberikan, tetapi juga dari pemerataan manfaat kebijakan antarwilayah dan kelompok sosial. Dengan demikian, efektivitas KIP dalam meningkatkan akses pendidikan perlu dilihat secara kontekstual dengan mempertimbangkan disparitas wilayah dan kapasitas kelembagaan.

Implementasi Kebijakan KIP

Temuan studi menunjukkan bahwa implementasi KIP menghadapi beberapa tantangan struktural dan administratif. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan pengawasan terhadap penggunaan dana bantuan. Meskipun KIP dirancang untuk mendukung kebutuhan pendidikan, dalam praktiknya penggunaan dana bantuan tidak selalu dapat diawasi secara optimal, sehingga berpotensi digunakan untuk keperluan di luar pendidikan (Putri et al., 2023).

Kurangnya sosialisasi kebijakan juga menjadi kendala dalam implementasi KIP. Sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami mekanisme pendaftaran, kriteria penerima, serta hak dan kewajiban penerima bantuan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya partisipasi kelompok sasaran tertentu dan menimbulkan kesenjangan dalam pemanfaatan kebijakan (Puspitasari & Aminullah, 2024).

Dalam perspektif kebijakan publik, tantangan-tantangan tersebut menunjukkan pentingnya penguatan tata kelola kebijakan, khususnya dalam aspek koordinasi antar lembaga, transparansi informasi, dan partisipasi masyarakat. Tanpa perbaikan pada aspek-aspek tersebut, efektivitas kebijakan KIP berisiko tidak optimal meskipun secara normatif memiliki tujuan yang baik.

Hasil dan analisis lainnya menunjukkan bahwa

kebijakan KIP memiliki tingkat efektivitas yang sangat tinggi dalam meningkatkan akses pendidikan, khususnya bagi anggota masyarakat yang kurang mampu. Namun, efektivitas tersebut masih bersifat relatif dan belum sepenuhnya merata. Ketepatan sasaran, pemerataan wilayah, serta kualitas implementasi menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan kebijakan.

Dalam kerangka evaluasi kebijakan publik, temuan ini memperkuat pandangan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh tujuan dan desain kebijakan, tetapi juga oleh proses implementasi dan konteks sosial tempat kebijakan tersebut dijalankan (Dunn, 2018). Oleh karena itu, perbaikan berkelanjutan terhadap tata kelola kebijakan KIP menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan akses pendidikan yang lebih adil dan merata di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan KIP memiliki peran strategis dalam meningkatkan akses pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu di Indonesia. Secara umum, kebijakan ini dinilai cukup efektif dalam mengurangi hambatan ekonomi yang berpotensi menyebabkan rendahnya partisipasi pendidikan dan tingginya risiko putus sekolah, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Bantuan yang diberikan melalui KIP memungkinkan peserta didik untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dasar sehingga dapat mempertahankan keberlanjutan pendidikan.

Efektivitas kebijakan KIP masih belum optimal. Masih terdapat kendala pada ketepatan sasaran, pemerataan antarwilayah, dan pengawasan penggunaan dana, sehingga manfaatnya belum dirasakan merata. Hal ini menunjukkan kesenjangan antara tujuan normatif KIP dan implementasinya. Oleh karena itu, KIP memerlukan sistem pendataan yang akurat, mekanisme penyaluran transparan, dan pengawasan berkelanjutan untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan dan keadilan sosial. Selain itu, program KIP perlu disempurnakan melalui pembaruan data penerima, penguatan koordinasi antar lembaga, dan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat. Perbaikan ini diharapkan meningkatkan efektivitas KIP tidak hanya sebagai bantuan pendidikan jangka pendek, tetapi juga sebagai instrumen berkelanjutan yang dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat

peran negara dalam menjamin hak atas pendidikan bagi seluruh warga.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. 2021. *Statistik pendidikan Indonesia 2021*. BPS RI, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Indikator pendidikan Indonesia 2022*. BPS RI, Jakarta
- Birkland, T. A. 2016, *An introduction to the policy process: Theories, concepts, and models of public policy making* (4th ed.). Routledge.
- Creswell, J. W., 2014, *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications
- Dunn, W. N. 2018. *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.
- Dye, T. R. 2013. *Understanding public policy* (14th ed.). Pearson Education.
- Hill, M., & Hupe, P. 2014. *Implementing public policy* (3rd ed.). Sage Publications.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2019. *Petunjuk teknis Program Indonesia Pintar*. Kemendikbud, Jakarta
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 2021. *Laporan kinerja Program Indonesia Pintar*. Kemendikbudristek, Jakarta
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 2022. *Laporan pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP)*. Kemendikbudristek, Jakarta
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. 1983. *Implementation and public policy*. Scott, Foresman and Company.
- Nugroho, R. 2017. *Public policy: Teori, manajemen, dinamika, analisis, dan evaluasi* (6th ed.). Elex Media Komputindo, Jakarta.
- OECD. 2018. *Education at a glance 2018: OECD indicators*. OECD Publishing.
- Purwanto, E. A., Sulistyastuti, D. R., & Makmur, M. 2015. *Implementasi kebijakan publik: Konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Gava Media, Yogyakarta
- Putra, F. 2019. *Kebijakan publik: Analisis, implementasi, dan evaluasi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sabatier, P. A., & Weible, C. M. 2014. *Theories of the policy process* (3rd ed.). Westview Press.
- Suharto, E. 2015. *Analisis kebijakan publik: Panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial*. Alfabeta, Bandung
- Tilaar, H. A. R. 2012. *Kebijakan pendidikan: Pengantar untuk memahami kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- UNESCO. 2015. *Education 2030: Incheon declaration and framework for action*. UNESCO Publishing.
- Wahab, S. A. (2016). *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara.
- Winarno, B. 2014. *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus*. CAPS, Yogyakarta
- World Bank. 2020. *Protecting all: Social protection for Indonesia's future*. World Bank.
- World Bank. 2021. *Indonesia economic prospects: Boosting the recovery*. World Bank.
- Yulianto, B., & Rahmawati, S. 2019. Kebijakan pendidikan dan pemerataan akses pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(2), pp. 85–98.